



# Sinergi Kelembagaan BUMKAM dalam penguatan ketahanan Pangan di Kawasan Perbatasan Timur Indonesia : Studi Administrasi publik di Kabupaten Merauke

Nur Jalal<sup>1</sup>, Hanova Rani Eka Retnaningtyas<sup>2</sup>, My Ismail<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Musamus Merauke, Merauke, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Musamus Merauke, Merauke, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Musamus Merauke, Merauke, Indonesia

## Abstract

This study aims to analyze the role of BUMKam in strengthening food security in rural areas through the perspective of governance and collaborative governance. The research was conducted in the OKABA District, Papua, using a descriptive-analytical qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews with 12 informants, including Bumkam managers, village government officials, farmers, and supporting stakeholders, as well as field observations and document studies. The results indicate that most villages rejected the opening of new farmland due to customary land conflicts and program misalignment with community needs, while optimizing existing land and improving irrigation channels were more accepted. Bumkam plays a role in mobilizing local resources, empowering farmers, and managing food enterprises, yet its effectiveness is limited by internal capacity, insufficient government support, and weak multi-stakeholder coordination. Moreover, there is no risk mitigation mechanism for crop failures due to disasters, making the village food system vulnerable. Literature analysis emphasizes the importance of adaptive governance, participatory planning, and multi-stakeholder collaboration to strengthen sustainable rural food security. These findings underscore the need for a more systematic and contextually appropriate institutional strategy for Bumkam to support food sovereignty in remote rural areas.

**Keywords:** food security; BUMKam; governance

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam penguatan ketahanan pangan desa melalui perspektif governance dan collaborative governance. Penelitian dilaksanakan di Distrik OKABA, Papua, dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan yang terdiri dari pengelola Bumkam, aparat pemerintah desa, petani, dan pemangku kepentingan pendukung, serta observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kampung menolak pembukaan lahan baru karena konflik tanah adat dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, sementara optimalisasi lahan yang ada dan perbaikan saluran irigasi lebih diterima. Bumkam berperan dalam mobilisasi sumber daya lokal, pemberdayaan petani, dan pengelolaan usaha pangan, namun efektivitasnya terbatas oleh kapasitas internal, kurangnya pendampingan pemerintah, dan lemahnya koordinasi multi-aktor. Selain itu, tidak terdapat mekanisme mitigasi risiko gagal panen akibat bencana, sehingga stabilitas pangan desa rentan terganggu. Analisis literatur menekankan pentingnya tata kelola adaptif, perencanaan partisipatif, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan desa secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya pengembangan strategi kelembagaan Bumkam yang lebih sistemik dan kontekstual guna mendukung kedaulatan pangan desa di wilayah terpencil.

**Kata Kunci:** ketahanan pangan; BUMKam; governance

<sup>1</sup> CONTACT: nurjalal242@gmail.com

DOI: <https://10.35724/mjpa.v8i1.7296>

## 1. Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat, stabilitas sosial, dan kedaulatan negara. Pemerintah Indonesia menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara adil dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 2, yaitu mengakhiri kelaparan dan mewujudkan ketahanan pangan (FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO, 2023).

Dalam konteks wilayah perbatasan, isu ketahanan pangan memiliki dimensi yang lebih kompleks. Wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi dan sosial, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara. Namun demikian, berbagai laporan nasional menunjukkan bahwa wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kapasitas kelembagaan lokal yang berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian pangan masyarakat (Bappenas, 2020). Kondisi ini menjadikan penguatan ekonomi lokal berbasis kelembagaan desa sebagai strategi penting dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Kabupaten Merauke sebagai bagian dari Provinsi Papua Selatan memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan timur Indonesia sekaligus lumbung pangan nasional, khususnya komoditas padi dan sagu. Pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan, termasuk pengembangan kawasan pangan dan pertanian skala luas, telah menempatkan Merauke sebagai wilayah prioritas ketahanan pangan nasional. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada keterlibatan dan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal di tingkat kampung (Kementerian Desa, PDTT, 2021).

Salah satu instrumen kelembagaan desa yang dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Untuk daerah Papua Bumdes lebih sering dikenal dengan BUMKam diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kampung melalui pengelolaan potensi lokal, termasuk sektor pangan, pertanian, dan distribusi hasil produksi masyarakat. Dalam kerangka administrasi publik, BUMKam merupakan bentuk inovasi kelembagaan yang menggabungkan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan tata kelola partisipatif.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kinerja BUMDes di banyak daerah masih belum optimal. Keterbatasan kapasitas manajerial, lemahnya sinergi antaraktor, serta rendahnya dukungan kebijakan teknis menjadi faktor utama yang menghambat peran BUMDes dalam pembangunan ekonomi lokal (Suryanto & Widodo, 2020; Kurniawan, 2019). Di wilayah timur Indonesia, tantangan tersebut diperparah oleh kondisi geografis, keterbatasan SDM, serta lemahnya jejaring antar kelembagaan desa dan pemerintah daerah.

Dalam konteks Kabupaten Merauke, keberadaan BUMKam sesungguhnya memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan kampung melalui pengelolaan produksi pangan lokal, distribusi hasil pertanian, serta penguatan akses pasar bagi petani dan masyarakat adat. Akan tetapi, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian BUMKam masih beroperasi secara administratif tanpa strategi bisnis yang jelas dan belum terintegrasi dengan kebijakan ketahanan pangan daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di tingkat lokal.

Dari perspektif administrasi publik, permasalahan tersebut berkaitan erat dengan aspek tata kelola (governance) dan sinergi kelembagaan. Osborne (2010) menegaskan bahwa tata kelola publik modern menuntut kolaborasi antara aktor pemerintah, masyarakat, dan sektor ekonomi lokal untuk mencapai tujuan pembangunan yang kompleks. Ketahanan pangan, sebagai isu lintas sektor, tidak dapat diselesaikan secara sektoral dan hierarkis, tetapi membutuhkan sinergi kelembagaan yang terencana dan berkelanjutan.

Sinergi antara pemerintah kampung, pengelola BUMKam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan pangan lokal. Tanpa koordinasi dan dukungan kebijakan yang jelas, BUMKam berpotensi hanya menjadi formalitas kelembagaan tanpa kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran BUMKam harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan publik yang memperhatikan konteks lokal, kapasitas institusional, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian mengenai sinergi BUMKam dan ketahanan pangan di Kabupaten Merauke menjadi penting karena belum banyak kajian administrasi publik yang secara spesifik membahas peran kelembagaan ekonomi kampung dalam konteks kawasan perbatasan timur Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek ekonomi desa secara umum, tanpa menggali secara mendalam dinamika tata kelola, relasi antaraktor, dan implementasi kebijakan di wilayah perbatasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini relevan untuk menganalisis bagaimana sinergi BUMKam dibangun dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Merauke serta faktor-faktor administrasi publik yang memengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian administrasi publik, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan BUMKam dan ketahanan pangan berbasis lokal di kawasan perbatasan.

## 2. Literatur Review

### 2.1 Konsep Ketahanan Pangan dan Kelembagaan Desa

Ketahanan pangan merupakan konsep yang luas dan multidimensional yang telah dibahas secara global dan lokal dalam berbagai kajian akademik. Secara umum, ketahanan pangan dipahami sebagai suatu kondisi di mana semua orang, pada setiap waktu, mempunyai akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka untuk hidup yang sehat dan aktif (World Food Summit 1996, dikutip dalam literatur konsep food security). Definisi ini memperluas pengertian ketahanan pangan dari sekadar ketersediaan pangan menjadi mencakup akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan dalam jangka panjang, sehingga mencakup dimensi yang saling terkait: ketersediaan pangan, akses pangan, utilisasi pangan, dan stabilitas pangan (Woru, 2022).

Ketahanan pangan pada tataran nasional hingga rumah tangga melibatkan berbagai faktor struktural dan kelembagaan. Dalam konteks desa atau komunitas lokal, ketahanan pangan tidak lagi dipandang hanya sebagai fungsi produksi atau stok pangan, tetapi juga sebagai hasil interaksi dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan setempat. Misalnya, kajian oleh Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Implementasi menyatakan bahwa ketahanan pangan melibatkan sistem yang terintegrasi dari produksi, distribusi, konsumsi, dan status gizi, serta menekankan pentingnya peran kelembagaan lokal dalam konteks desentralisasi untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan komunitas desa (Saliem & Ariani, 2016).

Pada tingkat lokal, terutama di pedesaan, konsep ketahanan pangan menjadi sangat relevan karena komunitas tersebut sering menghadapi tantangan akses pasar, infrastruktur, dan dukungan teknis yang terbatas. Studi terhadap ketahanan pangan di pedesaan di Indonesia, seperti yang dianalisis dalam berbagai penelitian desa, menunjukkan bahwa ketahanan pangan dipengaruhi oleh kapasitas rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi melalui produktivitas lokal serta kemampuan untuk mengakses sumber daya pangan yang diperlukan (Hannavi et al., 2018).

Dalam perspektif kebijakan lokal, ketahanan pangan juga dipandang sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang melibatkan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan pelaku non-pemerintah. Misalnya, kajian Food Security in the Local Government: A SDGs Perspective menunjukkan bahwa peningkatan produksi pangan di wilayah perdesaan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas implementasi kebijakan, terutama dalam konteks daerah perbatasan dan terpencil, di mana kelembagaan yang lemah dapat menghambat pencapaian target ketahanan pangan yang berkelanjutan (Tening et al., 2025).

Di Indonesia, pola desentralisasi yang kuat sejak otonomi daerah memberi ruang bagi desa untuk mengembangkan strategi lokal dalam memperkuat ketahanan pangan. Salah satu mekanisme kelembagaan yang semakin penting dalam konteks ini adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumkam), yaitu entitas usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk memobilisasi sumber daya lokal serta mengembangkan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa (*Village-owned enterprise*, 2025). Bumkam merupakan lembaga ekonomi lokal yang berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi desa, termasuk dalam konteks penguatan ketahanan pangan lokal.

Literatur yang mengkaji peran Bumkam dalam sistem ketahanan pangan menyoroti beberapa peran utama Bumkam dalam memperkuat ketahanan pangan desa. Penelitian oleh Triyono (2025) menyatakan bahwa Bumkam dapat memainkan peran sebagai aktor kunci dalam mobilisasi sumber daya komunitas, pemberdayaan petani kecil, serta dukungan terhadap inovasi sistem pangan lokal, yang pada gilirannya mampu meningkatkan ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat desa. Studi ini menekankan bahwa strategi yang diadopsi Bumkam untuk mengatasi tantangan akses pasar dan manajemen rantai pasok merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sistem pangan lokal yang lebih tahan terhadap guncangan eksternal dan perubahan lingkungan.

Penelitian lain yang berfokus pada tingkat desa (seperti studi kasus di Hargorejo, Yogyakarta) menunjukkan bahwa intervensi lokal dalam bentuk perencanaan strategis dan kolaborasi antar aktor lokal—termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga komunitas—dapat menghasilkan praktik ketahanan pangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Triyono, 2025). Hal ini mempertegas bahwa ketahanan pangan pada tataran desa tidak hanya bergantung pada produksi pangan semata, tetapi juga pada bagaimana komunitas dan lembaga lokal mengorganisasi dan mengatur akses terhadap pangan melalui berbagai strategi lokal.

Lebih jauh lagi, studi empiris lain menunjukkan bahwa institusi tradisional dan kelembagaan lokal di komunitas kecil juga memainkan peran signifikan dalam mendukung ketahanan pangan, misalnya melalui pengaturan sosial ekonomi dan hubungan komunitas yang mendukung usaha produktif pangan lokal (Hidrawati et al., 2023). Temuan ini menguatkan argumen bahwa ketahanan pangan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan struktur sosial setempat, sehingga kelembagaan desa—baik formal seperti Bumkam maupun informal seperti institusi adat atau komunitas—memiliki peran integral dalam sistem ketahanan pangan desa.

Dengan demikian, konsep ketahanan pangan telah berkembang dari fokus semata pada produksi menjadi pendekatan yang komprehensif, mencakup dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan, serta ditopang oleh peran serta kelembagaan lokal dalam rancangan dan implementasi strategi ketahanan pangan. Kelembagaan desa seperti Bumkam menjadi salah satu struktur penting dalam pendekatan tersebut karena kemampuannya untuk memediasi antara kebutuhan pangan masyarakat dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang tersedia di tingkat lokal, serta menjembatani antar aktor dalam upaya penguatan sistem pangan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa ketahanan pangan telah berkembang dari pendekatan produksi semata menuju pendekatan sistemik yang menekankan peran kelembagaan lokal. Namun demikian, sebagian besar kajian masih menempatkan kelembagaan desa sebagai faktor pendukung, bukan sebagai aktor strategis utama dalam

sistem pangan lokal. Studi-studi yang ada cenderung menyoroti aspek konseptual dan kebijakan, sementara kajian empiris yang mengkaji secara mendalam bagaimana kelembagaan desa—khususnya Bumkam—beroperasi dalam konteks sosial, budaya, dan geografis yang beragam masih terbatas. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengkaji ketahanan pangan desa melalui perspektif kelembagaan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada praktik di tingkat lokal.

## 2.2 Peran BUMKam dalam Ketahanan Pangan Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMKam) diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi desa yang berbasis potensi lokal. Dalam konteks ketahanan pangan, Bumkam berfungsi sebagai penghubung antara produksi pangan masyarakat desa dengan sistem distribusi dan pasar yang lebih luas. Studi Triyono (2025) dalam *The Role and Strategy of Village-Owned Enterprises (BUMKAM) in Strengthening Food Security* menunjukkan bahwa Bumkam memainkan peran signifikan dalam mobilisasi sumber daya lokal, pemberdayaan petani kecil, serta pengembangan inovasi sistem pangan desa untuk mendukung agenda kedaulatan pangan nasional. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan Bumkam mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan desa melalui pengelolaan unit usaha pertanian dan distribusi hasil panen secara kolektif (Triyono, 2025).

Bumkam juga berperan sebagai katalisator pembangunan ekonomi desa dengan memfasilitasi akses pasar bagi produk pertanian lokal. Dengan memotong mata rantai distribusi yang panjang, Bumkam dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan konsep ketahanan pangan yang tidak hanya menekankan ketersediaan pangan, tetapi juga akses ekonomi masyarakat terhadap pangan.

Penelitian Rulyianto dkk. (2023) di Desa Rioribati menemukan bahwa pemanfaatan dana desa melalui Bumkam memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan lokal, terutama melalui pengelolaan usaha pertanian dan distribusi hasil tani. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan struktural berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya jaringan pemasaran produk desa, yang membatasi optimalisasi peran Bumkam dalam jangka panjang.

Temuan serupa dikemukakan dalam studi di Desa Hilifalawu yang menunjukkan bahwa Bumkam berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui usaha ketahanan pangan berbasis lokal. Meski demikian, keterbatasan permodalan dan minimnya strategi promosi masih menjadi tantangan utama yang menghambat skala pengembangan usaha pangan desa (Halawa et al., 2024).

Literatur mengenai peran Bumkam dalam ketahanan pangan secara umum sepakat bahwa Bumkam memiliki potensi strategis dalam memperkuat sistem pangan desa melalui mobilisasi sumber daya dan pengelolaan usaha pertanian. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada kapasitas internal Bumkam, dukungan kebijakan, serta akses terhadap pasar. Sebagian besar studi masih bersifat deskriptif dan berfokus pada keberhasilan program tertentu, sementara analisis mengenai dinamika kelembagaan, tantangan struktural, dan keberlanjutan peran Bumkam dalam jangka panjang belum banyak dikaji secara kritis. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan analitis yang lebih mendalam terhadap peran Bumkam sebagai institusi ekonomi dan sosial dalam sistem ketahanan pangan desa.

## 2.3 Peran Ekonomi Desa dan Pemberdayaan Komunitas

Bumkam tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis desa, tetapi juga sebagai lembaga sosial-ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan desa, pemberdayaan komunitas menjadi kunci penguatan ketahanan pangan karena memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses produksi, pengelolaan, dan distribusi pangan.

Penelitian Harold et al. (2025) di Desa Molatabu menunjukkan bahwa Bumkam mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui model usaha yang melibatkan partisipasi komunitas secara langsung. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha Bumkam terbukti meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) serta keberlanjutan usaha pangan desa.

Literatur lain menegaskan bahwa Bumkam berperan sebagai sarana pembentukan modal sosial desa. Melalui kegiatan ekonomi kolektif, Bumkam mendorong kerja sama antarwarga dan memperkuat jaringan sosial yang berkontribusi pada ketahanan pangan jangka panjang. Hal ini mempertegas bahwa ketahanan pangan desa tidak dapat dilepaskan dari kapasitas sosial dan ekonomi komunitas lokal.

Rahman et al. (2024) menemukan bahwa kontribusi Bumkam lebih signifikan dalam peningkatan kapasitas petani—melalui akses modal, pasar, dan pendampingan—dibandingkan peningkatan produksi pangan secara langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem pangan desa yang berkelanjutan.

Kajian tentang pemberdayaan komunitas menegaskan bahwa Bumkam berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, literatur cenderung menempatkan pemberdayaan sebagai hasil akhir, bukan sebagai proses kelembagaan yang dinamis. Relasi kekuasaan, tingkat partisipasi riil masyarakat, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bumkam masih jarang dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, meskipun pemberdayaan komunitas diakui sebagai faktor penting dalam ketahanan pangan, masih diperlukan kajian yang menelaah bagaimana proses kelembagaan Bumkam memfasilitasi atau justru membatasi partisipasi masyarakat dalam praktik ekonomi pangan desa.

## 2.4 Kelembagaan, Tata Kelola, dan Sinergi Multi-Aktor

Keberhasilan Bumkam dalam mendukung ketahanan pangan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola kelembagaan. Kurnianto (2021) menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance*—meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan—berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan Bumkam.

Dalam perspektif administrasi publik, tata kelola Bumkam tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi multi-aktor melalui pendekatan *collaborative governance*. Model ini melibatkan pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan aktor lain dalam proses perencanaan dan implementasi program ketahanan pangan.

Pendekatan kolaboratif memungkinkan integrasi kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal desa, sehingga program ketahanan pangan lebih adaptif dan kontekstual. Literatur governance menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam menghadapi tantangan kompleks, termasuk krisis pangan dan keterbatasan infrastruktur.

Literatur governance dan collaborative governance memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami pentingnya sinergi multi-aktor dalam pengelolaan Bumkam. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan menekankan idealitas tata kelola tanpa mengkaji secara empiris bagaimana kolaborasi tersebut dijalankan di tingkat desa. Studi yang mengaitkan langsung praktik collaborative governance dengan capaian ketahanan pangan masih terbatas, khususnya dalam konteks desa dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Hal ini menunjukkan adanya celah antara konsep governance yang ideal dan realitas implementasi di tingkat lokal.

## 2.5 Perencanaan Strategis dan Implementasi Program

Perencanaan strategis menjadi elemen penting dalam memastikan peran Bumkam berjalan efektif dan berkelanjutan. Isnaini et al. (2025) menunjukkan bahwa Bumkam yang menerapkan perencanaan strategis berbasis potensi lokal dan manajemen sistematis mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan desa. Perencanaan yang bersifat partisipatif memungkinkan masyarakat desa terlibat sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga evaluasi program. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas implementasi program ketahanan pangan karena kegiatan yang dirancang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Penelitian mengenai perencanaan strategis Bumkam menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan manajemen sistematis dalam mendukung ketahanan pangan desa. Namun demikian, literatur masih minim dalam mengkaji keberlanjutan implementasi perencanaan tersebut, terutama ketika terjadi perubahan kepemimpinan desa atau dinamika sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, keterkaitan antara perencanaan strategis Bumkam dengan kerangka governance yang lebih luas masih belum banyak dibahas, sehingga diperlukan kajian yang mengintegrasikan aspek perencanaan, tata kelola, dan kolaborasi dalam satu kerangka analitis yang utuh.

## 2.6 Tantangan dan Kesenjangan Penelitian

Meskipun banyak studi menegaskan peran strategis Bumkam dalam ketahanan pangan, masih terdapat kesenjangan konseptual dan empiris. Sebagian besar penelitian bersifat deskriptif dan berbasis studi kasus tunggal, sehingga generalisasi temuan masih terbatas.

Selain itu, kajian yang mengintegrasikan pendekatan governance dan collaborative governance dalam konteks Bumkam dan ketahanan pangan—terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil—masih relatif minim. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang menggunakan kerangka teoritis kelembagaan secara lebih mendalam.

Berdasarkan sintesis literatur di atas, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang dapat diidentifikasi. Pertama, sebagian besar penelitian tentang Bumkam dan ketahanan pangan masih bersifat deskriptif dan berbasis studi kasus tunggal, sehingga belum memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan Bumkam dalam mendukung ketahanan pangan. Kedua, kajian yang mengintegrasikan pendekatan governance dan collaborative governance secara empiris dalam konteks ketahanan pangan desa masih sangat terbatas, khususnya di wilayah perbatasan atau daerah dengan tantangan geografis dan sosial budaya yang kompleks. Ketiga, masih minim penelitian yang secara spesifik menganalisis interaksi antar-aktor dan dinamika tata kelola Bumkam sebagai faktor penentu keberlanjutan sistem pangan desa. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan kajian literatur, penelitian ini menggunakan perspektif governance dan collaborative governance sebagai landasan teoretis utama untuk menganalisis peran Bumkam dalam ketahanan pangan desa. Kerangka konseptual penelitian menempatkan Bumkam sebagai aktor kelembagaan yang berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem pangan lokal. Interaksi kelembagaan, tata kelola adaptif, dan kolaborasi multi-aktor diposisikan sebagai variabel kunci yang memediasi hubungan antara peran Bumkam dan capaian ketahanan pangan desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memposisikan diri untuk melengkapi dan memperluas literatur yang ada dengan menganalisis peran Bumkam dalam penguatan ketahanan pangan desa melalui perspektif governance dan collaborative governance. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menekankan aspek programatik atau hasil ekonomi, penelitian ini berfokus pada dinamika kelembagaan, tata kelola adaptif, serta interaksi multi-aktor dalam konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan kelembagaan desa, sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan dan pengelolaan Bumkam dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam peran kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumkam) dalam penguatan ketahanan pangan desa melalui perspektif governance dan collaborative governance. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi dinamika kelembagaan, praktik tata kelola, serta interaksi antar-aktor dalam konteks lokal secara komprehensif.

Penelitian dilaksanakan di Kampung Okaba yang memiliki Bumkam aktif dalam kegiatan ketahanan pangan, yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria keterlibatan Bumkam dalam pengelolaan usaha pertanian, distribusi pangan, atau program ketahanan pangan desa. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, yaitu dari Maret hingga Mei 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, dan analisis awal.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, yang terdiri atas:

1. Pengelola Bumkam (Ketua dan/atau Direktur Bumkam) sebanyak 2 orang;
2. Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa atau perangkat desa yang membidangi ekonomi dan pembangunan) sebanyak 3 orang;
3. Kelompok masyarakat/petani yang terlibat dalam program ketahanan pangan Bumkam sebanyak 5 orang;
4. Pemangku kepentingan pendukung (pendamping desa atau mitra Bumkam) sebanyak 2 orang.

Teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung informan dalam pengelolaan Bumkam dan program ketahanan pangan desa. Untuk memperkaya data dan memastikan keterwakilan perspektif, teknik snowball sampling juga digunakan secara terbatas, khususnya dalam menentukan informan dari kelompok masyarakat yang direkomendasikan oleh informan kunci.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen desa, laporan Bumkam, regulasi terkait, dan publikasi ilmiah yang relevan. Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan durasi antara 30–60 menit untuk setiap informan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran Bumkam, tata kelola kelembagaan, kolaborasi multi-aktor, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan desa. Kerangka teori governance dan collaborative governance digunakan sebagai landasan analisis untuk menginterpretasikan temuan penelitian.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara antar informan, observasi lapangan, dan data dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

Dengan metode penelitian ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai peran Bumkam dalam penguatan ketahanan pangan desa serta faktor kelembagaan dan tata kelola yang memengaruhi efektivitas peran tersebut.

### 4. Hasil & Pembahasan

#### 4.1 Ketahanan Pangan dan Dukungan Kelembagaan Desa

Penelitian di Distrik OKABA, yang mencakup 9 kampung, menunjukkan bahwa hanya 2 kampung yang menyertuji pembukaan lahan baru untuk cetak sawah, sedangkan sisanya menolak. Penolakan tersebut muncul karena beragam alasan, antara lain: persoalan tanah adat, ketidakpuasan terhadap kesejahteraan yang dijanjikan, dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Sebagian warga justru menyarankan optimalisasi lahan yang ada, termasuk memanfaatkan pekarangan rumah dan memperbaiki saluran perairan yang sebelumnya ada, untuk mendukung produksi pangan (Informan Petani, Distrik OKABA, 2025).

Selain itu, ditemukan bahwa tidak semua masyarakat menjadi petani sawah, hanya sekitar 20% yang aktif mengelola lahan sawah. Fakta ini menunjukkan keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dan tantangan dalam membangun ketahanan pangan berbasis produksi sawah. Wawancara juga mengungkapkan bahwa pemerintah melalui dinas pertanian memberikan bibit, tetapi tidak secara aktif mengawal proses tanam, pemeliharaan, panen, dan akses pasar. Ketika terjadi gagal panen akibat banjir, masyarakat tidak mendapatkan solusi mitigasi bencana, seperti penyediaan penggilingan padi atau strategi pemasaran alternatif (Informan Kepala Kampung, 2025).

Fenomena ini sesuai dengan literatur mengenai ketahanan pangan yang menekankan dimensi akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan (FAO, 1996). Ketika sebagian besar masyarakat menolak pembukaan lahan baru dan lebih memilih optimalisasi lahan yang ada, hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal dalam implementasi program pangan desa. Wawancara lapangan memperlihatkan bahwa kelembagaan pemerintah masih lemah dalam mendukung produksi dan distribusi pangan. Literatur menyebutkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan desa sangat bergantung pada peran kelembagaan lokal dan tata kelola yang responsif (Saliem & Ariani, 2016; Tening et al., 2025).

Dalam konteks Distrik OKABA, strategi optimalisasi lahan yang ada lebih sesuai daripada membuka lahan baru. Hal ini sejalan dengan temuan Hidrawati et al. (2023) bahwa pengelolaan sumber daya lokal yang efektif, termasuk pekarangan rumah dan saluran irigasi, dapat meningkatkan ketahanan pangan desa tanpa harus membuka lahan baru. Namun, kekurangan dukungan pemerintah dalam pengawasan, mitigasi gagal panen, dan pemasaran hasil panen

menunjukkan bahwa institusi formal belum sepenuhnya berfungsi sebagai mediator antara produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2 Peran Bumkam dalam Optimalisasi Lahan dan Mitigasi Pangan**

Informan dari Bumkam Distrik OKABA menyatakan bahwa Bumkam belum berperan optimal dalam program ketahanan pangan sawah. Saat ini, Bumkam lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator administrasi dan penyedia bibit. Warga desa mengusulkan bahwa Bumkam bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk produksi pangan skala kecil dan membangun fasilitas penggilingan lokal, sehingga hasil panen dapat langsung diolah dan dipasarkan.

Beberapa kampung menunjukkan bahwa saluran perairan yang rusak dapat diperbaiki untuk mendukung irigasi, sehingga meningkatkan produktivitas lahan eksisting. Namun, tidak ada intervensi pemerintah yang berkelanjutan, terutama ketika menghadapi risiko gagal panen akibat bencana alam. Warga juga menekankan perlunya pelatihan, pemasaran, dan pendampingan teknis yang konsisten dari Bumkam dan dinas pertanian untuk menjaga keberlanjutan program (Informan Petani, 2025).

Literatur mengenai Bumkam menegaskan bahwa lembaga ini dapat menjadi aktor strategis dalam pemberdayaan petani dan penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan unit usaha lokal dan distribusi pangan (Triyono, 2025). Fakta di OKABA menunjukkan bahwa potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal, karena Bumkam saat ini masih terbatas pada peran administratif dan distribusi bibit. Hal ini sejalan dengan Rulyantyo et al. (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas Bumkam sangat bergantung pada kapasitas internal, dukungan kebijakan, dan kolaborasi dengan masyarakat.

Strategi optimalisasi lahan yang ada, termasuk pekarangan rumah dan saluran irigasi, mendukung literatur Hidrawati et al. (2023) tentang pemanfaatan sumber daya lokal untuk ketahanan pangan, sehingga tidak harus membuka lahan baru yang berisiko menimbulkan konflik sosial. Namun, kurangnya pengawasan dan mitigasi pemerintah mengindikasikan kesenjangan governance dan collaborative governance, yang dapat memengaruhi stabilitas pangan desa secara keseluruhan.

#### **4.3 Kelembagaan, Tata Kelola, dan Sinergi Multi-Aktor**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kampung, Pengurus Bumkam OKABA, dan Petani di 9 kampung, ditemukan bahwa kelembagaan desa dan sinergi multi-aktor masih lemah dalam menangani isu ketahanan pangan. Misalnya, ketika program pembukaan lahan sawah diusulkan, hanya 2 kampung yang menyetujui, sedangkan 7 kampung menolak karena konflik tanah adat, ketidakpuasan hasil yang dirasakan warga, serta program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat (Informan: Kepala Kampung A, 2025).

Warga dari kampung yang menolak menyatakan bahwa mereka lebih setuju pada optimalisasi lahan yang sudah ada (seperti pekarangan atau lahan tidur), perbaikan saluran irigasi lama, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Selain itu, ketika terjadi gagal panen akibat banjir, tidak ada tata kelola mitigasi bencana yang jelas dari pemerintah atau dinas pertanian, sehingga petani merasakan ketidakjelasan dukungan institusional pada fase kritis produksi.

Wawancara dengan pengurus Bumkam juga menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah kampung, dinas pertanian, dan kelompok tani masih berjalan terpisah-pisah, tanpa mekanisme struktur kolaboratif yang kuat. Banyak responden menyebut bahwa dukungan dari pemerintah hanya berupa pendistribusian bibit tanpa pendampingan teknis dan pemasaran yang bersinergi (Informan: Pengurus Bumkam, 2025).

Literatur mengenai tata kelola kelembagaan dan *collaborative governance* menekankan bahwa sinergi multi-aktor (pemerintah desa, lembaga lokal seperti Bumkam, kelompok masyarakat, dan pihak eksternal) merupakan faktor kunci keberhasilan program ketahanan pangan. Astuti & Suaedi (2021) menjelaskan bahwa model *collaborative governance* yang berhasil melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa adalah kunci terciptanya desa yang mandiri dan berdaya (Astuti & Suaedi, 2021). (E-Journal Universitas Palangka Raya)

Dalam konteks OKABA, temuan lapangan memperlihatkan kurangnya mekanisme tata kelola yang mendukung kolaborasi multi-aktor. Hal ini selaras dengan literatur yang menyatakan bahwa kelembagaan desa yang kuat dan terkoordinasi dapat memperkuat sistem pangan lokal apabila ada struktur partisipatif yang jelas antara Bumkam, pemerintah desa, aparat teknis (seperti dinas pertanian), dan kelompok masyarakat (Hadi et al., 2024). (Nakhoda)

Selain itu, penelitian Triyono (2025) menyatakan bahwa Bumkam dapat menjadi aktor penting dalam pengelolaan sistem pangan lokal jika mereka mampu memobilisasi sumber daya komunitas, mendukung inovasi, dan berkolaborasi dengan aktor lain untuk meningkatkan ketersediaan dan akses pangan (Triyono, 2025). (The Journal of Academic Science) Temuan di OKABA menunjukkan bahwa kelembagaan Bumkam masih dibatasi pada peran administratif dan distribusi input (bibit), belum mampu menjadi “jaringan koordinasi” antar aktor yang memadai, sehingga implementasi ketahanan pangan tidak optimal.

Data lapangan di OKABA menunjukkan bahwa kualitas tata kelola kelembagaan dan sinergi multi-aktor masih rendah, yang tercermin dari penolakan program pembukaan lahan, kurangnya mitigasi gagal panen, dan fragmentasi dukungan lembaga pemerintahan. Analisis literatur memperkuat bahwa kolaborasi antar lembaga dan tata kelola yang adaptif serta partisipatif merupakan komponen penting dalam memperkuat ketahanan pangan desa. Sinergi yang kuat antara Bumkam, pemerintah desa, dinas teknis, dan masyarakat harus dibangun dengan mekanisme *governance* yang jelas agar dapat mengatasi tantangan seperti ketidaksesuaian program, konflik adat, dan respons terhadap bencana.

#### **4.4 Perencanaan Strategis dan Implementasi Program**

Hasil wawancara dengan kepala kampung dan pengurus Bumkam mengungkapkan bahwa perencanaan strategis program ketahanan pangan di OKABA relatif lemah dan kurang partisipatif. Banyak warga menyatakan bahwa dokumen perencanaan program sering kali disusun tanpa melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga hasil akhir rencana kurang sesuai dengan kebutuhan lokal. Misalnya, meskipun pemerintah menyediakan bibit padi, warga merasa tidak cukup didampingi secara teknis dalam proses budidaya, pengendalian hama, serta akses pemasaran hasil panen (Informan: Petani, 2025).

Wawancara juga menunjukkan konsep program pembukaan lahan baru sering kali kurang mendapatkan dukungan karena hasil perencanaan tidak mempertimbangkan faktor sosial budaya (tanah adat) dan kebutuhan riil masyarakat yang lebih condong pada optimalisasi lahan yang sudah ada seperti pekarangan atau perbaikan infrastruktur air. Ketika terjadi gagal panen akibat banjir, masyarakat merasa tidak ada respons strategi mitigasi dari pemerintah atau dinas pertanian, sehingga kehilangan hasil produksi lebih besar (Informan: Ketua Kelompok Tani, 2025).

Analisis literatur menunjukkan bahwa perencanaan strategis partisipatif merupakan faktor penting untuk memastikan program yang dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi lokal. Isnaini et al. (2025) menyatakan bahwa perencanaan yang melibatkan masyarakat sejak tahap identifikasi kebutuhan, pengembangan strategi, sampai evaluasi dapat meningkatkan efektivitas implementasi program ketahanan pangan karena kegiatan yang dirancang sesuai dengan kondisi lokal (Isnaini et al., 2025). (E-Jurnal Kampus Akademik)

Temuan lapangan di OKABA memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan masih minim, yang kemudian menciptakan ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat, misalnya preferensi pada optimalisasi lahan ketimbang pembukaan lahan baru. Hal ini sejalan dengan pendekatan perencanaan strategis yang banyak direkomendasikan dalam literatur, yaitu bahwa program ketahanan pangan perlu disusun dengan basis data lokal, keterlibatan komunitas, dan respons terhadap tantangan real seperti kondisi geografis, hak atas tanah, serta dinamika sosial budaya.

Lebih jauh, literatur juga menyebut pentingnya strategi adaptif untuk menghadapi risiko gagal panen seperti bencana alam, namun ini jarang diintegrasikan ke dalam perencanaan operasional program di tingkat desa. Kebijakan dan perencanaan yang tidak mencakup mitigasi risiko terbukti rentan terhadap ketahanan pangan jangka panjang, sebagaimana didiskusikan dalam kajian *collaborative governance* kebijakan pangan yang menekankan integrasi aspek monitoring, mitigasi, dan evaluasi sebagai bagian dari perencanaan strategis (Nugroho et al., 2025).

Perencanaan strategis di OKABA belum memadai untuk menjawab kebutuhan lokal, karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan keterbatasan strategi respons terhadap risiko produksi seperti gagal panen. Literatur menguatkan bahwa perencanaan yang partisipatif dan adaptif terhadap kondisi lokal (termasuk mitigasi risiko) merupakan elemen penting dalam tata kelola ketahanan pangan desa. Penyusunan perencanaan yang lebih inklusif akan mendorong sinkronisasi antara kebijakan desa dan kebutuhan riil masyarakat.

#### **2.5 Tantangan dan Kesenjangan Penelitian**

Berdasarkan wawancara dan observasi di 9 kampung Distrik OKABA, terdapat sejumlah tantangan utama dalam implementasi program ketahanan pangan berbasis Bumkam:

1. Resistensi masyarakat terhadap pembukaan lahan baru: Dari 9 kampung, hanya 2 kampung menyetujui pembukaan lahan baru. Penolakan mayoritas kampung disebabkan oleh konflik tanah adat, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, dan kekhawatiran kesejahteraan jangka panjang. Beberapa warga menekankan bahwa optimalisasi lahan yang ada, seperti pekarangan rumah dan perbaikan saluran irigasi, lebih realistik dan sesuai kebutuhan lokal (Informan Petani, 2025).
2. Ketergantungan parsial pada pemerintah : Meskipun dinas pertanian menyediakan bibit, pendampingan teknis, pengawasan, dan fasilitasi pasar belum optimal. Misalnya, ketika terjadi gagal panen akibat banjir, tidak ada mekanisme mitigasi risiko bencana atau strategi alternatif untuk menjaga pendapatan petani (Informan Kepala Kampung, 2025).
3. Kapasitas Bumkam yang terbatas Bumkam di OKABA saat ini berfokus pada distribusi bibit dan administrasi program, namun belum memanfaatkan potensi sebagai pengelola produksi, penggilingan, atau pemasaran pangan lokal secara mandiri. Keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan jaringan pemasaran menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan peran strategis Bumkam (Informan Pengurus Bumkam, 2025).
4. Kurangnya koordinasi multi-aktor Program ketahanan pangan berjalan secara fragmentaris karena sinergi antara Bumkam, pemerintah desa, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lain belum terbentuk secara formal. Kolaborasi hanya terjadi pada level ad-hoc dan tidak terstruktur, sehingga mengurangi efektivitas program (Observasi Lapangan, 2025).

Literatur mengenai ketahanan pangan dan kelembagaan desa menekankan bahwa tantangan implementasi program pangan desa sering terkait dengan kelembagaan lokal, kapasitas Bumkam, dan partisipasi masyarakat. Triyono (2025) menyatakan bahwa Bumkam memiliki potensi besar dalam mobilisasi sumber daya lokal dan inovasi sistem pangan desa, namun efektivitasnya tergantung pada kapasitas internal, tata kelola yang baik, dan kolaborasi multi-aktor (Triyono, 2025).

Hadi et al. (2024) menekankan pentingnya governance adaptif dan kolaboratif di tingkat desa agar kebijakan ketahanan pangan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk konflik tanah adat, risiko bencana, dan

keberagaman ekonomi rumah tangga ([nakhoda.ejournal.unri.ac.id](http://nakhoda.ejournal.unri.ac.id)). Temuan di OKABA menunjukkan bahwa kesenjangan governance nyata, terutama pada mitigasi gagal panen, akses pasar, dan integrasi program antar aktor.

Selain itu, literatur menyebut bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan strategis sangat penting untuk keberlanjutan program. Isnaini et al. (2025) menyatakan bahwa perencanaan partisipatif meningkatkan efektivitas implementasi, karena strategi yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal lebih responsif terhadap tantangan sosial dan budaya ([ejurnal.kampusakademik.co.id](http://ejurnal.kampusakademik.co.id)). Kondisi di OKABA menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan menjadi salah satu faktor kegagalan program dalam mencapai target ketahanan pangan.

Berdasarkan sintesis antara hasil lapangan dan literatur, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi:

1. Fokus penelitian masih bersifat deskriptif: Sebagian besar penelitian mengenai Bumkam dan ketahanan pangan (Triyono, 2025; Ruliyanto et al., 2023) menekankan pada hasil program atau strategi keberhasilan tertentu, namun kurang mengkaji dinamika internal kelembagaan dan interaksi sosial dalam konteks lokal yang beragam.
2. Kesenjangan governance dan kolaborasi multi-aktor: Literatur tentang *collaborative governance* masih minim yang menghubungkan praktik kolaborasi langsung dengan capaian ketahanan pangan, terutama di wilayah terpencil dan konflik sosial seperti OKABA. Data lapangan menunjukkan bahwa program berjalan fragmentaris tanpa koordinasi formal antar aktor, sehingga ada peluang penelitian untuk menganalisis mekanisme governance lokal yang efektif.
3. Keterbatasan mitigasi risiko dan adaptasi bencana: Banyak studi belum menekankan bagaimana Bumkam atau lembaga lokal mengelola risiko gagal panen akibat bencana alam, padahal fakta lapangan di OKABA menunjukkan bahwa bencana banjir berpengaruh besar pada stabilitas pangan desa. Kajian empiris mengenai strategi adaptif dalam konteks lokal masih terbatas.
4. Kurangnya pendekatan sistemik: Penelitian sebelumnya sering menekankan program atau unit usaha tertentu, tetapi kurang membahas interaksi kelembagaan, tata kelola adaptif, dan kolaborasi multi-aktor sebagai satu sistem terpadu dalam mendukung ketahanan pangan.

Ini menegaskan bahwa tantangan utama ketahanan pangan desa di OKABA meliputi konflik sosial terkait lahan, kapasitas Bumkam terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan lemahnya kolaborasi multi-aktor. Literatur mendukung temuan ini dengan menekankan pentingnya governance adaptif, partisipasi masyarakat, dan sinergi kelembagaan dalam memperkuat ketahanan pangan desa. Kesenjangan penelitian yang muncul membuka peluang bagi studi lebih lanjut untuk menganalisis peran strategis Bumkam dalam konteks governance dan mitigasi risiko, terutama di desa dengan kompleksitas sosial, budaya, dan geografis yang tinggi.

Ketahanan pangan desa dipengaruhi oleh berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Di Distrik OKABA, mayoritas kampung menolak pembukaan lahan baru karena konflik tanah adat, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, dan kekhawatiran terhadap kesejahteraan jangka panjang, sementara optimalisasi lahan yang ada lebih diterima. Kapasitas Bumkam yang terbatas, kurangnya pendampingan dan supervisi dari pemerintah, serta lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan menghambat efektivitas program ketahanan pangan. Fakta lapangan juga menunjukkan kurangnya mekanisme mitigasi risiko gagal panen akibat banjir, sehingga stabilitas pangan desa rentan terganggu. Analisis literatur mendukung temuan ini, menekankan pentingnya governance adaptif, kolaborasi multi-aktor, dan perencanaan partisipatif untuk memperkuat ketahanan pangan desa (Triyono, 2025; Hadi et al., 2024; Isnaini et al., 2025). Kesenjangan penelitian saat ini menunjukkan perlunya studi yang mengkaji secara sistemik peran Bumkam, tata kelola kelembagaan, dan strategi mitigasi risiko, sehingga dapat memberikan kontribusi pada penguatan ketahanan pangan desa yang berkelanjutan.

## 5. Kesimpulan

Ketahanan pangan desa merupakan hasil interaksi kompleks antara produksi pangan, akses ekonomi, dan kapasitas kelembagaan lokal, termasuk peran strategis Bumkam. Temuan di Distrik OKABA menunjukkan bahwa mayoritas kampung menolak pembukaan lahan baru karena konflik tanah adat dan ketidaksesuaian program, sementara optimalisasi lahan yang ada dan perbaikan saluran irigasi lebih diterima. Keterbatasan kapasitas Bumkam, kurangnya pendampingan pemerintah, lemahnya kolaborasi multi-aktor, serta tidak adanya mekanisme mitigasi risiko gagal panen memperlihatkan kerentanan sistem pangan lokal. Analisis literatur menekankan bahwa tata kelola adaptif, perencanaan partisipatif, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan pangan desa (Triyono, 2025; Hadi et al., 2024; Isnaini et al., 2025). Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada minimnya studi yang menelaah secara sistemik peran Bumkam, tata kelola kelembagaan, dan strategi mitigasi risiko, sehingga penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan desa yang berkelanjutan dan responsif terhadap kondisi lokal.

## 6. Daftar Pustaka

- [1] Aguinis, H. (2013). *Performance Management*. 3rd Edition. Pearson Prentice Hall.
- [2] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. <https://www.bappenas.go.id>

- [3] Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, United Nations Children's Fund, World Food Programme, & World Health Organization. (2023). *The state of food security and nutrition in the world*. <https://www.fao.org>
- [4] Halawa, M., Zebua, Y., & Telaumbanua, R. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumkam) dalam mengembangkan usaha ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Hilifalawu. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 1123–1135. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15059>
- [5] Hannavi, I. E., Ferichani, M., Antriayandarti, E., & Ani, S. W. (2018). Rural household food security in Kudus Central Java. *Jurnal Agribest*, 2(2), 179–190. <https://doi.org/10.32528/agribest.v2i2.1629>
- [6] Harold, A., Yusuf, M., & Dunggio, T. (2025). Peran Bumkam dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan berbasis partisipasi masyarakat di Desa Molutabu. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 45–58. <https://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/article/view/347>
- [7] Hidrawati, H., Rianse, U., Iswandi, R. M., Arafah, N., Hamzah, A., & Harviyaddin, H. (2023). The role of traditional institutions in supporting food security of small island communities. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(2), 878–887. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.02.38>
- [8] Isnaini, N., Putra, R. A., & Wahyuni, S. (2025). Perencanaan strategis Bumkam dalam mewujudkan ketahanan pangan desa. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Publik*, 7(1), 89–102. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/japm/article/view/7097>
- [9] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Kebijakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumkam)*. <https://kemendesa.go.id>
- [10] Kurnianto, T. (2021). Good governance sebagai determinan kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumkam). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 6(2), 973–987. <https://e-journal.unair.ac.id/JRABA/article/view/35534>
- [11] Kurniawan, B. (2019). *Desa mandiri, desa membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- [12] Osborne, S. P. (2010). *The new public governance?* Routledge.
- [13] Rahman, N., Fauzan, M., & Hidayat, A. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan kapasitas petani dan ketahanan pangan lokal. *Journal of Islamic Economics and Social Analysis*, 5(2), 201–215. <https://ejurnal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/view/1787>
- [14] Ruliyanto, R., Saputra, D., & Nugroho, A. (2023). Pemanfaatan dana desa melalui Bumkam dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Rioribati. *Jurnal Manajemen dan Masyarakat Nusantara*, 5(2), 134–147. <https://ejurnal.stipas.ac.id/index.php/jmmn/article/view/200>
- [15] Saliem, H. P., & Ariani, M. (2016). Ketahanan pangan: Konsep, pengukuran, dan strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1), 12–24. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1367>
- [16] Suryanto, & Widodo, T. (2020). Peran Bumkam dalam pemberdayaan ekonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2).
- [17] Tening, G. F., Akbar, P., Budiman, B., Burhan, R., Rafdi, H., & Low, K. C. (2025). Food security in the local government: A SDGs perspective of evaluation of dry land policy and rice production. *Journal of Local Government Issues*, 8(2), 233–246. <https://doi.org/10.22219/logos.v8i2.41610>
- [18] Triyono, T. (2025). The role and strategy of village-owned enterprises (Bumkam) in strengthening food security towards Indonesia's food sovereignty 2045. *The Journal of Academic Science*, 2(5), 401–412. <https://doi.org/10.59613/m9jysd34>
- [19] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [20] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- [21] *Village-owned enterprise*. (2025, August 12). In Wikipedia. Retrieved December 26, 2025, from [https://en.wikipedia.org/wiki/Village-owned\\_enterprise](https://en.wikipedia.org/wiki/Village-owned_enterprise)